

SKRIPSI

**TATA KELOLA PARIWISATA PANTAI BATUMIANAK KECAMATAN
TOPOYO KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



MUHAMMAD AKSAN

Nomor Stambuk : 10564 01791 13

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak
Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

Nama Mahasiswa : Muhammad Aksan

Nomer Stambuk : 105640179113

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. St. Nurmaeta MM

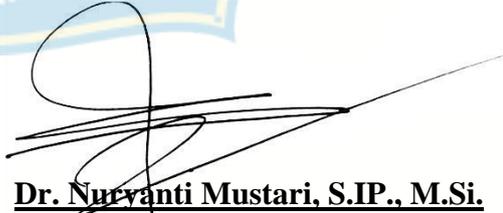

A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si

Mengetahui,

Dekan Fispol Unismu Makassar

ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Aksan

Nomer Stambuk : 105640179113

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan benar karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis dan dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun ini pencabutan gelar akademik

Makassar, 6 September 2018

Yang menyatakan

Muhammad Aksan

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan undangan menguji ujian skripsi Dekan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 047/FSP/A.-VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2019

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, S.Sos., M.Si

()

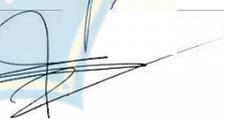
2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM

()

3. Andi.Luhur Prianto, S.IP., M.Si

()

4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si.

()

ABSTRAK

MUHAMMAD AKSAN. 2019. Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah (Di Bimbing oleh Sitti Nurmaeta dan A. Luhur Prianto).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dan factor-faktor pendukung dan penghambat Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Jenis dan tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan berupa observasi, dokumentasi serta wawancara dari beberapa informan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat dari indikator pengelolaan yaitu : (1). Pemerintah, tata kelola pariwisata pantai Batu Mianak masih perlu perhatian lebih dari berbagai pihak terkait banyak hal yang harus dibenahi terutama menyangkut fasilitas umum seperti tempat parkir, ruang ganti, mushola, lampu, bale bale untuk beristirahat dan villa atau penginapan bagi wisatawan dari luar daerah. (2). Masyarakat, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah berharap objek wisata pantai batumianak bisa menjadi sarana bagi pemerintah untuk memperkenalkan daerah dan kebudayaan yang ada di Mamuju Tengah, hanya saja masih belum di manfaatkan secara maksimal. (3). Swasta sebagai salah satu indikator dan upaya dalam pengembangan objek wisata yang seharusnya dapat di lakukan dengan melibatkan pihak – pihak terkait masih belum sesuai dengan yang di harapkan, karena pengawasan seharusnya bisa lebih maksimal bila pemerintah dan semua stakeholder mampu bahu membahu dalam upaya pengendalian tersebut. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu : factor pendukung adalah (1). Potensi Daerah dan (2). Peran Aktif Masyarakat sedangkan faktor penghambatnya adalah (1). Sarana Prasana Belum Memadai dan (2). Keterbatasan Anggaran.

Kata Kunci : Tata Kelola, Pariwisata

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tata Kelola Pariwisata Pantai BatuMianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah"**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu **Dra. Hj. St. Nurmaeta, M.M** selaku Pembimbing I dan bapak **A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Selain itu penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim , SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam urusan administrasi di kampus.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan dorongan dan motivasi dalam kelancaran penulisan skripsi.
6. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah yang telah memberikan informasi dan data selama penelitian.
7. Terkhusus buat kedua orang tua saya bapak Gunarta dan ibu Ninik lestari yang memberikan support dan dukungan moril serta memberikan fasilitas umum dalam menunjang pendidikan yang saya jalani selama ini.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus untuk kelas B Ilmu Pemerintahan angkatan 2013 yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat di selesaikan oleh penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan kita semua, Amin.

Makassar, 05 Agustus 2019

Muhammad Aksan

DAFTAR ISI

Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Ilmiah	iii
Penerimaan Tim	iv
Absrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Tata Kelola Pariwisata	8
B. <i>Good Government</i>	10
C. <i>Collaborative Governance</i>	16
D. Konsep Pengembangan Kawasan	23
E. Kerangka Pikir	26
F. Fokus Penelitian	28
G. Deskripsi Fokus Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian	30
C. Sumber Data	31
D. Informan Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	32
G. Teknik Keasbsahan Data	33

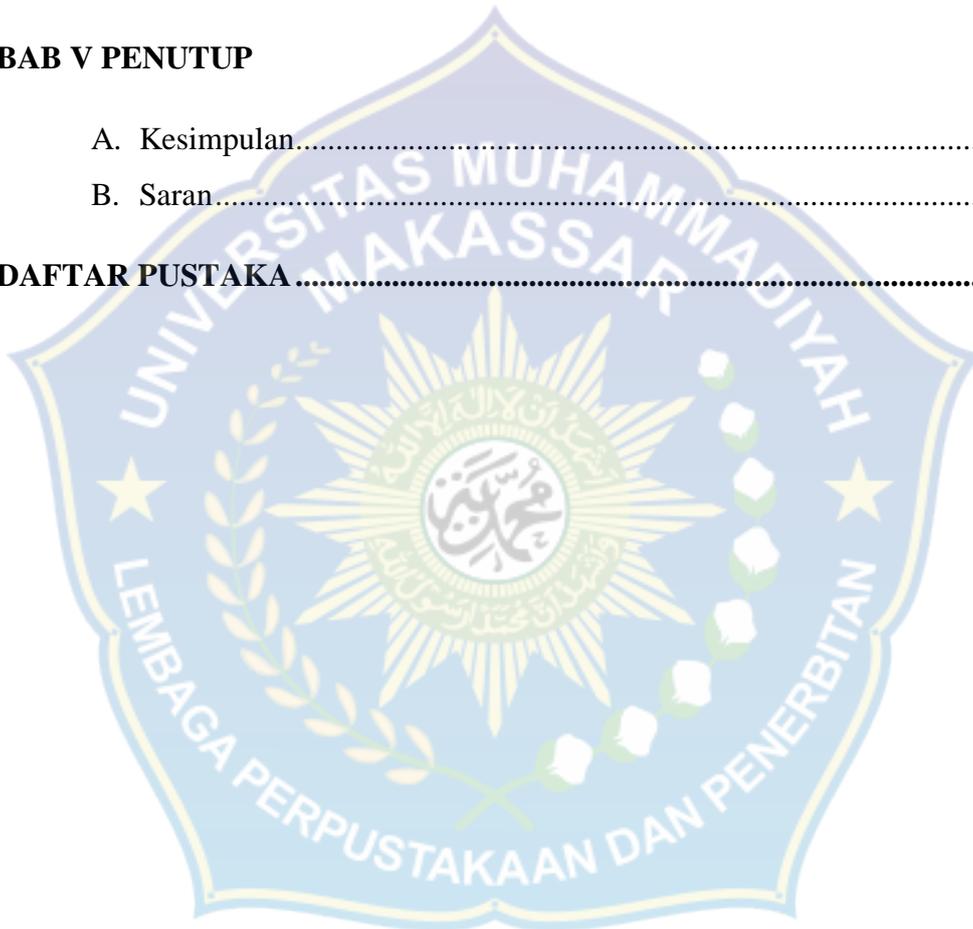
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	35
B. Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah	39
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan	31
Tabel. 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga Di Kabupaten Mamuju Tengah.....	37
Tabel 1.3 Objek Wisata Berdasarkan Jenis Wisata Bahari Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018.....	40
Tabel 1.4 Banyaknya Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018	41
Tabel 1.5 Grafik Berdasarkan Ojek Wisata	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir27



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergeseran paradigma dari pariwisata lama (*mass tourism*) ke pariwisata baru (*Alternative Tourism*) telah mendorong pelaku pariwisata semakin menyadari ekosistem sebagai bagian dari kegiatan wisatanya. Mereka menyadari betapa pentingnya keseimbangan lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam bagi kehidupan generasi mendatang. Pola hidup kembali ke alam (*back to nature*) telah mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan ke daerah-daerah alami, serta memiliki sejumlah besar potensi sumberdaya yang bernilai.

Wilayah pesisir pantai memiliki potensi sumberdaya alam wilayah pesisir pantai cukup beragam antara sektor perikanan, peternakan, pertanian, dan pariwisata sektor-sektor tersebut jika dikembangkan secara tepat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama perkembangan sektor pariwisata kondisi yang demikian juga di temukan di daerah Mamuju Tengah. Pola perjalanan ini telah mendorong berkembangnya paradigma baru dalam pariwisata berbasis alam atau dikenal dengan ekowisata yang merupakan bentuk pariwisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya serta kepedulian pada masyarakat sekitar pada kawasan-kawasan konservasi sejalan dengan visi pengembangan ekowisata yaitu konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Kegiatan pariwisata merupakan proses pengembangan wilayah yaitu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan suatu daerah maupun masyarakat. Penting juga dalam mendorong kegiatan ekonomi meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dan memberikan peluang kerja. Peran tersebut, antara lain ditunjukkan oleh kontribusi kepariwisataan penerimaan devisa dengan negara, nilai tambah PDRB, dampak yang diberikan dikunjungi wisatawan sehingga memberikan kemakmuran dan kesejahteraan serta pembangunan manusia bagi penduduk setempat dimana pariwisata itu dikembangkan (Yoeti, 2008).

Memberdayakan masyarakat pesisir tidak seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya karena di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat antara lain masyarakat nelayan tangkap, nelayan pengumpul/baku, nelayan buruh, nelayan tambak, petani, dan pelaku usaha pariwisata. Masing-masing kelompok masyarakat tersebut memerlukan pendekatan yang berbeda, sehingga program pemberdayaan masyarakat pesisir harus didesain dengan kelompok yang lain antara wilayah pesisir satu dengan yang lain.

Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan bagian dari Sulawesi Barat adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Kabupaten maupun wisata budaya yang bernilai sejarah. memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah wisata. Mamuju Tengah memiliki daerah pantai, dataran dan pegunungan serta merupakan daerah tujuan transmigrasi sehingga memiliki berbagai fenomena kultur yang menarik antara penduduk luar Tidak hanya wisata budaya saja yang terdapat didaerah ini, terdapat wisata sejarah dan wisata alam.

Potensi-potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah didukung oleh fasilitas-fasilitas agar berkembang lebih optimal menjadi sebuah kawasan wisata. Berbagai aktifitas yang telah berlangsung secara baik. Oleh karena itu, untuk mendukung peningkatan potensi wisata perlu

dilakukan identifikasitsi dikelola secara baik. Dalam mengidentifikasi potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Mamuju Tengah secara detail, maka dilakukan identifikasi potensi wisata terhadap masing-masing Kecamatan. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki Kecamatan yang memiliki potensi wisata cukup beragam salah satu dari Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Topoyo.

Menurut Undang- undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis provinsi merupakan kawasan budidaya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi dan atau menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi dapat berupa kawasan permukiman, kawasan kehutanan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasana perindustrian dan kawasan pariwisata.

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata dijelaskan bahwa, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintahan.

Pantai Batumianak adalah salah satu dari banyak pantai yang dapat anda kunjungi ketika berada di Mamuju Tengah Sulawesi Barat. Pantai ini tepatnya terletak sekitar 12 km dari daerah Topoyo, berada dalam daerah administrasi desa Tumbu, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Pantai ini ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal, pantai ini merupakan salah satu lokasi wisata yang terkenal di Mamuju Tengah karena pantai ini menjadi lokasi peribadatan

warga Mamuju Tengah yang beragama Hindu. Selain itu yang menjadi salah satu daya tarik dari pantai ini adalah pohon bakau yang berada di sepanjang pantai.

Pada Penelitian ini, Peneliti berkesempatan untuk meneliti Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Tentunya memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya karena Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah memiliki daya tarik tersendiri yaitu Pohon bakau, air sumur Wai tumbur yang tetap tawar walaupun bercampur dengan air laut, dan merupakan tempat kegiatan ibadah umat hindu seperti nyepi. Pantai dengan garis pesisir panjang dan ditumbuhi oleh bakau (*mangrove*) ini sering dijadikan sebagai lokasi peribadatan bagi warga Mamuju Tengah yang beragama Hindu. Penduduk beragama Hindu tersebut berasal dari Bali dalam program transmigrasi sehingga diketahui bahwa Kabupaten Mamuju Tengah memiliki warga yang beragama Hindu, berdampak dalam kegiatan daerah asal mereka. Pada hari besar agama seperti saat hari raya Galungan, atau Kuningan, hari hari besar umat Hindu Bali menjadi pusat kegiatan peribadatan yang cukup ramai didatangi, mereka biasanya melakukan kegiatan di pesisir pantai Batumianak. Hal ini mirip seperti yang kita temukan di Bali misalnya di tanah Lot, dimana ibadah dilakukan daerah mendekati pesisir. Untuk hari-hari biasa maka pantai ini cukup sepi, jika anda ingin memotret budaya orang-orang Hindu di Mamuju Tengah maka berkunjunglah ke pantai ini saat hari raya tersebut, ada banyak tradisi dan ritual yang menarik untuk disaksikan. Pantai Batumianak memiliki potensi wisata budaya religi yang bisa dijadikan salah satu destinasi wisata, ada ritual dan tradisi yang berjalan dan dapat dipotret serta dilihat secara langsung, hal yang sama seperti ini memperkuat elemen budaya Bali di Mamuju Tengah.

Pembangunan Pantai Batumianak sebagai tempat wisata harus dikelola dan dikembangkan secara baik, sebab tempat objek wisata menuntut kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja atau lembaga pengelola objek wisata, hal ini harus melibatkan seluruh pihak yang terkait, termasuk masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi masyarakat agar tercipta objek wisata pantai yang baik. Terkait masalah yang masih menjadi penghambat bagi objek wisata pantai Batumianak adalah aspek jalan yang masih belum seluruhnya di perbaiki misalnya belum beraspal sebagai penunjang mobilitas masyarakat menuju Pantai Batumianak keadaan ini diperparah dengan banyaknya jalan yang berlubang dan lebar jalan yang tidak memadai bagi pengguna jalan. serta beberapa fasilitas penunjang juga masih minim, seperti bale-bale bambu untuk beristirahat bagi pengunjung dan tidak adanya fasilitas toilet umum, tempat parkir dan lain-lain.

Untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah khususnya di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah maka di perlukan beberapa pendekatan diantaranya:

- a. Pemerintah, Tata Kelola Pariwisata pantai haruslah memperhatikan faktor yang dijabarkan diatas dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta melibatkan masyarakat pesisir pantai melalui beberapa tahapan yaitu berawal dari zonasi provinsi dan Kabupaten kemudian perencanaan yang di tentukan oleh pemerintah di laksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dengan catatan tidak merusak ekosistem yang ada di dalam lahan pesisir pantai;

- b. Masyarakat, Pemanfaatan lahan pesisir pantai adalah menggunakan potensi yang ada pada lahan baik dikelola secara perseorangan ataupun kelompok. Pemanfaatan lahan pesisir hendaknya mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga pemanfaatan sesuai dengan potensi yang ada pada lahan pesisir pantai dan pemanfaatannya pun bisa maksimal sehingga bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pengelola lahan khususnya;
- c. Swasta, Dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus. Pengawasan dan/atau pengendalian dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat sebuah judul penelitian **“Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam melengkapi kajian-kajian mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya peranan Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat bidang Tata Kelola Kawasan Pantai dan salah satu bahan bacaan yang berharga bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangsi pemikiran dan bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk pelaksanaan Tata Kelola Pariwisata Pantai di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah yang bermanfaat serta dapat berguna bagi masyarakat dan wisatawan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tata Kelola Pariwisata

Istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Inggris “*Governance*” yaitu: “*the act, fact, manner of governing*” berarti tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Sementara menurut Farazmand (2004:7) Terdapat tiga komponen kunci dari *governance* yaitu negara dan institusi, organisasi masyarakat sipil yang diabaikan dalam sistem sebelumnya dan sektor swasta yang seharusnya tidak terlibat dalam proses atau dinamika pemerintahan. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan pengelolaan urusan pemerintahan yang melibatkan ketiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam segala bidang baik bidang politik, sosial, budaya, maupun administrasi. Istilah *governance* disebut juga dengan tata kelola. (Amnah dkk 2016:7)

Dalam pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat; pemerintah lebih memusatkan perannya sebagai fasilitator. Pemerintah memfasilitasi masyarakat dan swasta dalam produksi dan distribusi pelayanan publik secara khusus bersifat lokal, unik dan spesifik. Misalnya pelayanan pariwisata. Pemerintah memberikan fasilitas seperti fasilitas surat izin pariwisata, fasilitas infrastruktur, fasilitas pembinaan, pelatihan dan penyuluhan, serta memberikan informasi pariwisata kepada masyarakat. Masyarakat berperan dalam mengelola wisata pedesaan dan menjalin hubungan (kontak) dan kerjasama dengan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Semakin besarnya kemampuan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memusatkan perhatiannya pada fungsinya yang lebih strategis sebagai regulator, fasilitator dan promotor pelayanan publik. Kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik bisa menjadi satu upaya untuk melakukan demokratisasi. Melalui cara ini, inisiatif dan partisipasi masyarakat untuk memperbanyak alternatif sumber pelayanan publik disamping pemerintah akan dapat ditingkatkan.

Disamping peran pemerintah, hendaknya swasta juga dilibatkan dalam kemitraan ini. Peran swasta biasanya pada segi operasionalisasi atau implementasi kebijakan, kontribusi tenaga ahli, tenaga terampil maupun sumbangan dana, alat atau teknologi. Sedangkan peran masyarakat pada umumnya disampaikan dalam bentuk partisipasi non mobilisasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, peran pemerintah sangat ditentukan oleh fungsi yang melekat, sifatnya memberikan keuntungan kedua belah pihak atau *positive sum game* (swasta dan masyarakat). Sedangkan peran pihak swasta adalah menyediakan beberapa fasilitas atau akomodasi dan jasa yang sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Peran masyarakat yaitu masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas kepariwisataan. (dalam Wahyuni, Eksi, Anggraeni E. RR (2014:79)

Lebih lanjut dijelaskan peran masing-masing aktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata adalah kemampuan pemerintah di dalam menjalankan fungsi atau peran fasilitasi, regulasi, mediasi, stimulasi dan koordinasi terhadap swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
2. Peran swasta dalam pengembangan pariwisata adalah kemampuan swasta di dalam menjalankan peran atau fungsinya sebagai penyedia dan penyelenggara jasa pelayanan di bidang pariwisata dalam pengembangan pariwisata.
3. Peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah kemampuan masyarakat dalam menjalankan peran atau fungsinya sampai pada peran sebagai mitra pemerintah dan swasta yaitu masyarakat memiliki daya yang relevan dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan pariwisata.

Dari fenomena pengembangan pariwisata, ketiga faktor yang dimaksud memiliki hubungan yang sinergis dalam menjalankan peranan dan fungsinya. Dari aspek hubungan transnasional yang menyatakan bahwa hubungan yang bermakna bukan hanya yang terjadi antar negara, tetapi juga melibatkan mereka dengan swasta seperti perusahaan multinasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun individu.

B. Good Government

1. Pengertian *Good Government*

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, *good governance* sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru, melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan

tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *good governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*. Lebih lanjut LAN menegaskan bahwa dilihat dari segi *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Good Governance menurut LAN mengandung dua pengertian. *Pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara *domain-domain* negara, sektor swasta dan masyarakat.

UNDP dalam workshopnya menyimpulkan bahwa “*that good governance system are participatory, implying that all members of governance institution have a voice in influencing decision-making*”. Sistem pemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang menyatakan bahwa semua anggota institusi *governance* memiliki suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi. Prosedur dan metode pembuatan

keputusan harus transparan (*transparent*) agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Siapa saja yang dipilih untuk membuat keputusan dalam pemerintahan, organisasi bisnis dan organisasi masyarakat sipil (*business and civil society organizations*) harus bertanggung jawab kepada publik, serta kepada institusi *stakeholders*. Institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan rakyat, memfasilitasi (*fasilitative*) dan memberi peluang (*enabling*) ketimbang mengontrol (*controlling*), melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan (*the rule of law*).

Bank Dunia memberi batasan *good governance* sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya. Gerald Meier memberikan pengertian *good governance*, yaitu "prinsip mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggung jawab pada publik, dan dimana mekanisme pasar merupakan pertimbangan utama dalam proses pembuatan keputusan mengenai alokasi sumberdaya".

Selanjutnya Sedarmayanti mengelompokkan unsur-unsur pemerintahan (*governance stakeholders*) ke dalam 3 kategori, yaitu:

1. Negara/Pemerintahan; konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (*Civil Society Organization*).
2. Sektor Swasta; pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan

(*manufacturing*), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.

3. Masyarakat Madani (*Civil Society*); kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

2. Maksud dan Tujuan

Menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif agar dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep good government harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (*state*)/ pemerintah (*government*), swasta (*private*) dan masyarakat (*society*).

3. Prinsip-Prinsip Good Government

Kunci utama memahami good government adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good government. Prinsip-prinsip *good government* antara lain:

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kestaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

4. Manfaat

Manfaat dari *good government* adalah :

- 1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.
- 2) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- 3) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

C. Collaborative Governance

Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung stakeholder di luar negara, berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007, dalam Setyoko 2011: 15)

Fokus dari pada *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara para stakeholder. *Collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. (Setyoko 2011: 16)

Menurut O'Leary dan Bingham dalam Sudarmo (2015: 195) kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses fasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini didukung oleh Bardach dalam Sudarmo (2015: 195) yang mendefinisikan *collaboration* sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerjasama ditujukan untuk meningkatkan *public value* ketimbang bekerja sendiri-sendiri.

Definisi *Collaborative governance* menurut Ansell and Gash 2007 dalam Subarsono (2016: 175) menyatakan : “A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets” (*Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu

atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset).

Definisi tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, yaitu:

1. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
2. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non-publik
3. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk kepada aktor-aktor publik.
4. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.
6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Edward DeSeve (2007) dalam Sudarmo (2011) mendefinisikan *Collaborative Governance* adalah sebagai berikut: “*An integrtd system og relationships that is managed across formal and informal organizational boundaries with reconginized organizational principles and clear defenition of success*” (Sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan defenisi kesuksesan yang jelas).

Selanjutnya Agrawal dan Lemos dalam Subarsono (2016:176) mendefinisikan *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada steholder yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya multipartner governance yang meliputi sektor privat/swsta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama publik-privat-sosial. Sejalan dengan itu Balogh dkk dalam Subarsono (2016: 176) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai: “*The processes and struktures of public policy decision making and mangement that engage people constructively across the boudaries of public agencies, levels of government, and/or the public,privat and civic spheres in the order to carry out a public purposethet could not otherwise be accomplished*”(Sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta, dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja).

Robertson dan Choi (2010: 10) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan didalamnya memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan dan setiap stekholder memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. Bovaird dalam Dwiyanto (2011: 252) mendefinisikan kemitraan antara pemerintah dan swasta secara sederhana sebagai pengaturan pekerjaan berdasarkan komitmen timbal balik, melebihi dan diatas yang diatur dalam setiap kontrak, antara satu organisasi di sektor publik dengan organisasi di luar sektor publik.

Dari definisi yang dikemukakan oleh Bovaird tersebut secara jelas mengatakan bahwa kemitraan melibatkan bentuk kerjasama yang lebih dari sekedar kontrak kerja sama. Kerjasama yang dijelaskan dalam konsep kemitraan antara sektor publik dan swasta adalah kerja sama masing-masing pihak memiliki kepedulian melebihi apa yang tertulis dalam kontrak.

Menurut Sunaryo Bambang dalam Hafiz (2015:8) tujuan dan misi pembangunan tata kelola kepariwisataan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hanya akan dapat terlaksana secara maksimal manakala dalam proses pencapaiannya dapat dilakukan melalui berbagai prinsip-prinsip tata kelola kepariwisataan yang baik (*Good Tourism Governance*).

Good Tourism Governance atau Tata Kelola Kepariwisata yang Baik merupakan konsep yang diadaptasi dari konsep *Good Governance* untuk melakukan pengelolaan di sektor pariwisata. Pengelolaan sektor pariwisata berdasarkan konsep ini mengedepankan keterlibatan 3 (tiga) aktor kunci, yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta.

Menurut Sunaryo Bambang dalam Hafiz (2015:8) prinsip penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta melibatkan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta/ industri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait.

Secara teoritis pola manajemen dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraannya yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut ini:

1. Partisipasi Masyarakat Terkait

Masyarakat setempat harus mengawasi dan mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

2. Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat Pariwisata), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi industri wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.

3. Kemitraan Kepemilikan Lokal

Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Usaha fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, cindermata, transportasi wisata dan sebagainya. Seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat melalui model kemitraan yang sinergis. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudian akses untuk para pelaku bisnis/wirusaha setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kerjasama kemitraan kepemilikan usaha. Lebih lanjut, keterkaitan antara pelaku-pelaku

bisnis dengan masyarakat setempat harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal dari berbagai usaha tersebut.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara berlanjut, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan pembangunan kepariwisataan harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah berlaku.

5. Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/ wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik. Misalnya kerjasama dalam pengembangan atraksi wisata budaya atau cultural tourism partnership dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen sampai pada pemasaran.

6. Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik , biotik, sosial, ekonomi dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada. Program dan kegiatan serta pengoperasiannya

seharusnya dipantau dan di evaluasi secara regular sehingga dapat dilakukan penyesuaian /perbaikan yang dibutuhkan secara dini. Skala dan tipe fasilitas wisata harus di upayakan tidak melampaui batas ambang penggunaan yang dapat ditoleransi.

7. Monitor dan Evaluasi Program

Kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berlanjut mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala internasional, nasional, regional, lokal.

8. Akuntabilitas Lingkungan

Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat setempat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas kinerja yang tinggi serta memastikan bahwa sumber- sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan

9. Pelatihan Pada Masyarakat Terkait

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan

bisnis secara profesional, pelatihan sebaiknya diarahkan pada topik-topik pelatihan tentang kepariwisataan berkelanjutan, manajemen perhotelan secara berkelanjutan, serta topik-topik lain yang relevan dengan wawasan berkelanjutan pembangunan kepariwisataan.

10. Promosi dan Advokasi Nilai Budaya

Pembangunan kepariwisataan secara berkelanjutan juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi pembangunan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan.

Menurut Sunaryo Bambang dalam Hafiz (2015:12) dalam penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik, yang paling dibutuhkan dari sektor publik adalah adanya perubahan yang baik dalam secara berfikir maupun bertindak, terutama dengan meninggalkan paradigma lama yang berupa suatu bangunan penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik dan berwawasan lokus tunggal yang berupa birokrasi pemerintahan untuk menuju kepada paradigma baru yang berupa model penyelenggaraan pemerintah yang desentralistik dan berlokus jamak.

D. Konsep Pengembangan Kawasan

Pengembangan wisata diperlukan bila akan menjadikan wisata tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pengembangan dilakukan baik di dalam obyek wisatanya maupun fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan obyek wisata tersebut. Pengembangan wisata alam terbagi dalam empat (Fandeli, 2000) yaitu

tahap pengenalan, ditandai dengan mulai meningkatnya pengunjung kemudian tahap dengan pengunjung meningkat dengan tajam, tahap selanjutnya perkembangan pengunjung tidak meningkat, dan pada tahap akhir adalah jumlah pengunjung menurun. Usaha pengembangan, wisata diharapkan mampu mempertahankan dan memperpanjang kondisi ekosistem yang ada agar tetap diminati oleh para wisatawan. Pengembangan pariwisata di kawasan alam harus memperhatikan beberapa prinsip yaitu (Douglass dalam Fandeli, 2000) :

1. Pengembangan wisata alam harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang
2. Menyesuaikan antara potensi alam dan tujuan pengembangan
3. Sedapat mungkin pengembangan yang dilakukan mempunyai fungsi ganda, dalam arti memberikan keuntungan secara ekonomi dan tidak meninggalkan aspek konservasi.
4. Sejauh mungkin tetap mengembangkan area untuk tidak dikembangkan.

Berdasarkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten mamuju tengah terdapat beberapa kebijakan yang mendukung potensi wisata

RTRW Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015 – 2035	RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2012 – 2035
Kawasan Pariwisata Peruntukan kawasan pariwisata di Kabupaten Mamuju Tengah terdiri atas; kawasan peruntukan wisata budaya, kawasan peruntukan wisata alam, kawasan peruntukan wisata bahari, kawasan peruntukan wisata	Bidang Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan Tempat Potensi wisata cukup banyak untuk dikembangkan, berdasarkan data yang ada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

<p>agro, kawasan peruntukan wisata minat khusus dan kawasan peruntukan wisata buatan. Uraian masing-masing peruntukan wisata tersebut di Kecamatan Topoyo, diuraikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan peruntukan wisata budaya : <ol style="list-style-type: none"> a. Benteng Kayu Mangiwang b. Rumah adat Topoyo 2. Kawasan peruntukan wisata alam <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan pasir putih Dato 3. Kawasan peruntukan wisata bahari <ol style="list-style-type: none"> a. Pantai Batu Miana 4. Kawasan peruntukan wisata agro (perkebunan jeruk) 	<p>Kabupaten Mamuju Tengah, tempat potensi pariwisata di Kecamatan Topoyo sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air Terjun Kalando 2. Pantai Dato 3. Rumah Adat Tangkou 4. Wai Tumbur 5. Pantai Batumianak 6. Pantai Patulana
--	--

(Sumber :RIPPDA (2018))

RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) telah dijelaskan bahwa Pantai Batumeana atau Pantai Batu Mianak adalah salah satu dari banyak pantai yang dapat anda kunjungi ketika berada di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Adapun Analisis Potensi Wisata Berdasarkan Sarana Prasarana

Pantai Batumiana dari RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) yaitu Prasarana (Air Bersih, Listrik, Telekomunikasi, Persampahan, dan Drainase), dan Sarana Penunjang (Akomodasi, Jasa Pangan, dan Sarana Pelengkap Kepariwisataaan).

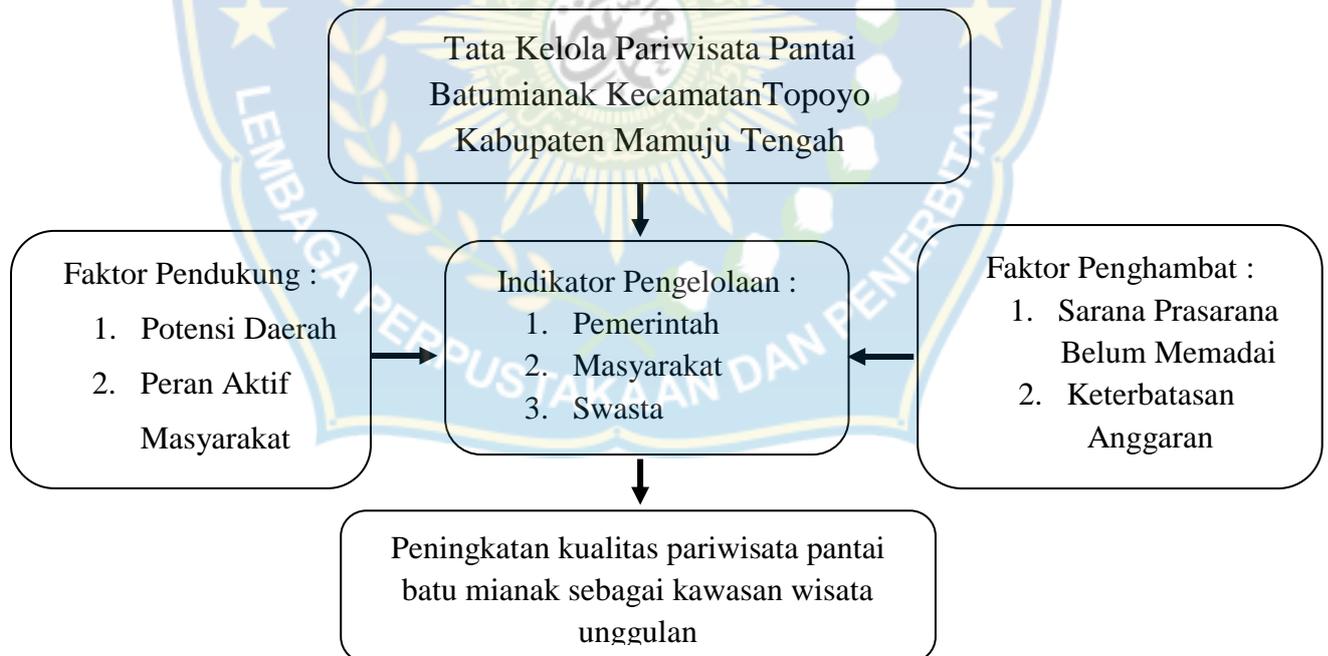
Pantai Batumianak atau Pantai Batu Mianak adalah salah satu dari banyak pantai yang dapat anda kunjungi ketika berada di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Pantai ini tepatnya terletak sekitar 12 Km dari daerah Topoyo, berada dalam daerah administratif Desa Tumbu, kecamatan Topoyo, kabupaten Mamuju Tengah. Pantai ini ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal, pantai ini merupakan salah satu lokasi wisata yang terkenal di Mamuju Tengah karena pantai ini menjadi lokasi peribadatan warga Mamuju Tengah yang beragama Hindu. Selain itu yang menjadi salah satu daya tarik dari pantai ini adalah pohon bakau yang berada di sepanjang pantai.

E. Kerangka Pikir

Mengidentifikasi potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Mamuju Tengah secara detail, maka dilakukan identifikasi potensi wisata terhadap masing-masing Kecamatan. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki potensi wisata yang cukup beragam salah satu dari Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Topoyo. Pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata kelola wisata agar tidak merusak lingkungan hidup, Menurut Sunaryo Bambang dalam Hafiz (2015:8) prinsip penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta melibatkan partisipasi aktif

yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta/ industri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, peran pemerintah sangat ditentukan oleh fungsi yang melekat, sifatnya memberikan keuntungan kedua belah pihak atau *positive sum game* (swasta dan masyarakat). Sedangkan peran pihak swasta adalah menyediakan beberapa fasilitas atau akomodasi dan jasa yang sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Peran masyarakat yaitu masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas kepariwisataan. Berdasarkan penjelasan kerangka pikir diatas, maka untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka yang menjadi fokus penelitian bentuk Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan melihat dari adanya sinkronisasi/koordinasi baik dari Pemerintah, Masyarakat serta Swasta, dan faktor pendukung dan faktor Penghambat.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pemerintah

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah berharap objek wisata pantai batumianak bisa menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, hanya saja masih belum di manfaatkan secara maksimal, masih banyak hal yang harus di benahi baik itu dari sarana wisatanya maupun faktor penunjang seperti infrastruktur jalan menuju ke pantai karena infrastruktur merupakan pendukung utama bagi suatu wilayah terutama jika wilayah tersebut memiliki kawasan yang dijadikan tempat berwisata minimnya upaya pemerintah dalam hal promosi juga sangat disayangkan itu terlihat dari kurangnya kegiatan kebudayaan yang dapat menarik wisatawan.

2. Masyarakat

Tata kelola pariwisata pantai batu mianak masih perlu perhatian lebih dari berbagai pihak terkait banyak hal yang harus dibenahi terutama menyangkut fasilitas umum seperti tempat parkir, ruang ganti, mushola, lampu, bale-bale untuk istirahat dan villa atau penginapan bagi wisatawan dari luar

daerah. Disamping itu tentu sangat diperlukan peran aktif dari masyarakat dan pengunjung untuk sama-sama merawat dan menjaga tempat tersebut demi kenyamanan bersama.

3. Swasta

Pihak swasta merupakan salah satu indikator dan upaya dalam mengembangkan objek wisata yang seharusnya dapat dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait masih belum sesuai dengan yang diharapkan, karena pemerintah dan semua stakeholder mampu bahu-membahu dalam upaya pengendalian tersebut. Faktor pendukung dalam pengelolaan objek wisata Pantai Batumianak di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah yaitu potensi daerah dan peran aktif dari masyarakat sehingga dapat mengembangkan dan membangun objek wisata Pantai Batumianak yang lebih baik dan dapat menarik perhatian wisatawan. Sedangkan faktor penghambat dalam Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan anggaran sehingga menghambat dalam proses pengembangan Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan dimulai pada tanggal 03 November 2018 sampai 05 Desember 2018. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan dasar pertimbangan karena lokasi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti mengenai tata kelola pariwisata khususnya di Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atas dasar bahwa informasi yang akan diteliti adalah berkaitan dengan penghayatan, pengalaman, pemahaman dan pemberian arti informan tentang Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi – situasi atau kejadian. Kekuatan penelitian kualitatif terletak pada kemampuan peneliti dalam membangun pandangan mereka tentang apa yang diteliti secara rinci, yang dinarasikan dengan kata – kata maupun gambaran secara holistik

C. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang sumbernya dari pemerintah daerah dan masyarakat, data tersebut berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip resmi serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode dengan cara pemilihan secara purposive, informan di pilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu. Adapun yang akan di jadikan informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Drs. Bambang Suparni, S.Pd, M.Pd	BS	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1 Orang
2.	Ince Huldi Tahir, SE	IH	Staf Bidang Kepariwisata	1 Orang
3.	Samsul Bahri, SE	SB	Pengelola Pantai Batumianak	1 Orang
4.	Ince Irwan Tahir, S.Pd.i	IR	Tokoh Masyarakat	1 Orang
5.	Desi Rasdin	DR	Pengunjung	1 Orang
Total Informan				5 Orang

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Dokumentasi, pengumpulan data melalui laporan lapangan dalam rangka menganalisis masalah yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang menyangkut Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dan hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang dikaji dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Milles dan Huberman (1992) yaitu tiga proses yang berlangsung secara interaktif.

1. Reduksi data, yaitu proses memiliki memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data dari berbagai sumber data misalnya dari catatan lapangan, dokumentasi, arsip, dan sebagainya, sedangkan proses mempertegas, memperpendek membuang yang tidak perlu menentukan fokus dan mengatur data sehingga kesimpulan bisa dibuat.

2. Penyajian data, seperti merakit data dan menyajikan dengan baik supaya lebih mudah dipahami. Penyajian bisa berupa uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya agar makna pariwisata lebih mudah dipahami.
3. Menarik kesimpulan/verifikasi, proses penarik kesimpulan awal harus kuat dan terbuka, kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data berakhir

H. Keabsahan Data

Menurut Milles Dan Huberman (dalam Sugiyono 2010) Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut Lexy J. Moleong (2012:330)“ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang dimaksud adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.
3. Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Profil Kabupaten Mamuju Tengah

Kabupaten Mamuju Tengah Secara Geografis terletak pada Bagian Barat Pulau Sulawesi dan berposisi pada bentangan Selat Makassar, yakni 10 47' 82'' – 20 17' 31'' Lintang Selatan, 119 08' 13'' – 119 24' 08'' Bujur Timur, Jakarta (00 0' 0'', Jakarta= 1600 48' 28'' Bujur Timur Green Witch). Dengan batas wilayah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Benggaulu Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Bicara, Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Karama dan Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013, luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah adalah 3.014,37 km², secara administrasi pemerintahan, terdiri atas 5 Kecamatan, 54 Desa, dan 2 (UPT) Unit Pemukiman Transmigrasi. Ibukota kabupaten terletak di Wilayah Benteng Kayu Mangiwang Kecamatan Tobadak. Berdasarkan orbitasi, kecamatan yang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten adalah ibukota Kecamatan Karossa (Karossa) yaitu sejauh 45 Km, dan ibukota kecamatan yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Topoyo dan

Kecamatan Budong-Budong yang berbatasan langsung dengan Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah.

b. Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Mamuju Tengah di sebelah barat umumnya datar dan semakin ke timur kondisinya semakin bergelombang dan berbukit. Bagian wilayah dengan kemiringan lereng antara 0-2 persen seluas 62.936,98 ha; 2-5 persen seluas 13.190,77 ha; 5-15 persen seluas 38.544,73 ha; 15-40 persen seluas 144.055,16 ha; dan besar dari 40 persen seluas 29.734,70 ha. Luas terbesar terdapat di wilayah Kecamatan Budong-Budong, yakni 30.048 Ha. Sedang untuk kemiringan lereng antara 2-15 persen terdapat di Kecamatan Tobadak seluas 25.066 ha. Jika dicermati konfigurasi wilayah Kabupaten Mamuju Tengah menurut kemiringan lereng, maka bagian wilayah yang termasuk datar adalah bagian sebelah barat yang berbatasan dengan Selat Makassar. Sebaliknya, semakin ke Timur secara gradual juga tingkat kemiringan ini semakin tinggi dengan kondisi lahan yang bergelombang dan berbukit.

c. Kondisi Sosial dan Budaya

Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 adalah sebanyak 183,972 jiwa yang terbagi kedalam 5 kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Budong-budong dengan jumlah 42,839 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah pada Kecamatan Pangale dengan jumlah 18,950 jiwa. Berikut adalah tabel yang menyajikan jumlah penduduk tiap kecamatan:

Tabel 1.2: Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016

No.	Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk
1.	Topoyo	9,752	39,721
2.	Budong-Budong	10,738	42,839
3.	Tobadak	9,822	41,172
4.	Pangale	4,777	18,950
5.	Karossa	8,921	41,290
Jumlah		43,650	183,972

(Sumber : Bappeda Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017)

d. Visi dan Misi Kabupaten Mamuju Tengah

Rumusan visi ini mengacu kepada berbangsa dan bernegara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara ketertiban dunia. Rumusan visi ini bersumber dari rumusan visi-misi kepada daerah terpilih. Rumusan yang merupakan kontrak politik tersebut dijabarkan secara teknokratik berdasarkan analisis permasalahan dan isu-isu strategis untuk menjadi kontrak kinerja. Dalam penjabaran tersebut, dilakukan kajian atas konsistensi dengan visi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah, visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, visi RPJM Nasional, serta arahan RTRW Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut maka rumusan pernyataan visi, pokok-pokok visi, penjelasan pernyataan visi dan penjelasan pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Kemandirian Daerah dalam Bingkai Lalla Tassi’sara melalui Gerakan Bersama Membangun Mamuju Tengah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2021”

Muara dari visi ini adalah kesejahteraan masyarakat, hulu dari visi ini adalah kemandirian daerah, sementara jembatan antara hulu dan hilir tersebut adalah bingkai lalla tassi'sara melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah. Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah maka ditetapkan Pembangunan Daerah 2016-2021 dinyatakan sebagai Gerbang - 8 sebagai berikut:

1. Percepatan peningkatan infrastruktur dasar meliputi perbaikan kualitas jalan dan jembatan, sarana dan prasarana air bersih, sumber energi listrik serta energi yang lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur kesehatan melalui peningkatan layanan rumah sakit, puskesmas dan pustu serta sumberdaya manusia di bidang kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.
3. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan untuk menciptakan generasi yang berkualitas, terandalkan dan bermoral.
4. Peningkatan dan penyediaan infrastruktur dan prasarana pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki berdasarkan kondisi wilayah di setiap kecamatan.
6. Mendorong terwujudnya kualitas pelayanan birokrasi dan pemerintahan yang bersih, jujur dan bermartabat serta berdaya saing.

7. Mendorong terciptanya stabilitas dan keamanan masyarakat Mamuju Tengah melalui toleransi antar umat beragama serta perlindungan hak asasi manusia.
8. Mendorong terpeliharanya nilai-nilai keagamaan, budaya, kearifan lokal, tradisi dan keyakinan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan ras di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

d. Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah

Bidang pariwisata merupakan salah satu bidang yang ada pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang membidangi tentang kepariwisataan.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, terdiri atas

1. Kepala Bidang Pariwisata, dalam melaksanakan tugas, Kepala bidang pariwisata membawahi tiga kepala seksi, yaitu sebagai berikut :
 - a. Kepala Seksi Promosi Kepariwisata
 - b. Kepala Seksi Pembinaan Objek Wisata Sarana Dan Jasa Pariwisata
 - c. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata

B. Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

Tata kelola Pantai merupakan kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Tata kelola pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Tata kelola pantai termasuk dalam kategori kawasan yang terletak di tepi pantai, dimana pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial dan ekonomi.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasandan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektorantara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” Undanag-Undang no 27 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penataan pariwisata Pantai Batu Mianak sejauh ini dari hasil pengamatan yang telah dilakukan masih belum maksimal terlihat dari banyaknya kekurangan di beberapa tempat seperti belum terkelolanya sampah dengan baik, ada beberapa pohon bakau yang terlihat mati yang dimana pohon bakau ini juga merupakan salah satu daya tarik dari wisatawan selain sebagai penahan abrasi dari air laut, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan Tata Kelola Parawisata Pantai Batumianak Di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 1.3 Objek Wisata Berdasarkan Jenis Wisata Bahari Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018

NO .	OBJEK WISATA ALAM	WILAYAH	JUMLAH PENGENJUNG	
			Nusantara	Mancanegara
1	PANTAI KOMBILING	KOMBILING, KEC. PANGALE	750	0
2	PANTAI LUMU	LUMU, KEC. BUDONG-BUDONG	120	0
3	PANTAI TUMBU	TUMBU, KEC. TOPOYO	95	0
4	PANTAI KAMBUNONG	KAMBUNONG, KEC. KAROSSA	11.000	0
5	PULAU KAMBUNONG	KAMBUNONG, KEC. KAROSSA	600	0
6	PANTAI BATU MEANA	TUMBU, KEC. TOPOYO	12.500	0
7	PANTAI KIRE	KEC. BUDONG-BUDONG	120	0
8	PANTAI PATULANA	BUDONG-BUDONG, KEC. TOPOYO	300	0
9	PANTAI BATU REDE	BUDONG-BUDONG, KEC. TOPOYO	5.385	0

10	PANTAI KALIA	TASOKKO, KEC. KAROSSA	150	0
11	PANTAI BATU KARAMPUANG	TASOKKO, KEC. KAROSSA	350	0
12	PANTAI ANGGALEHA	LARA, KEC. KAROSSA	450	0
13	PANTAI KAROSSA	KAROSSA, KEC. KAROSSA	325	0
14	PANTAI SALUBIRO	SALUBIRO, KEC. KAROSSA	100	0
15	PANTAI LARA	LARA, KEC. KAROSSA	230	0
16	PANTAI DATO	TUMBU, KEC. TOPOYO	750	0
17	PANTAI POLO PANTAI	POLO PANTAI, KEC. PANGALE	900	0
18	PANTAI KARAMA	KARAMA, KEC. PANGALE	800	0
19	PANTAI BABANA	BABANA, KEC. BUDONG-BUDONG	1.100	0
20	PULAU TOPOSSE	KAMBUNONG, KEC. KAROSSA	20	0
21	WISATA MANGGROVE	KAMBUNONG, KEC. KAROSSA	200	0
22	KAWASAN PENYU TANJUNG PATAGANG	KAMBUNONG, KEC. KAROSSA	20	0
23	KAWASAN MALEO TANJUNG PATAGANG	KAMBUNONG, KEC. KAROSSA	20	0
			36.285	

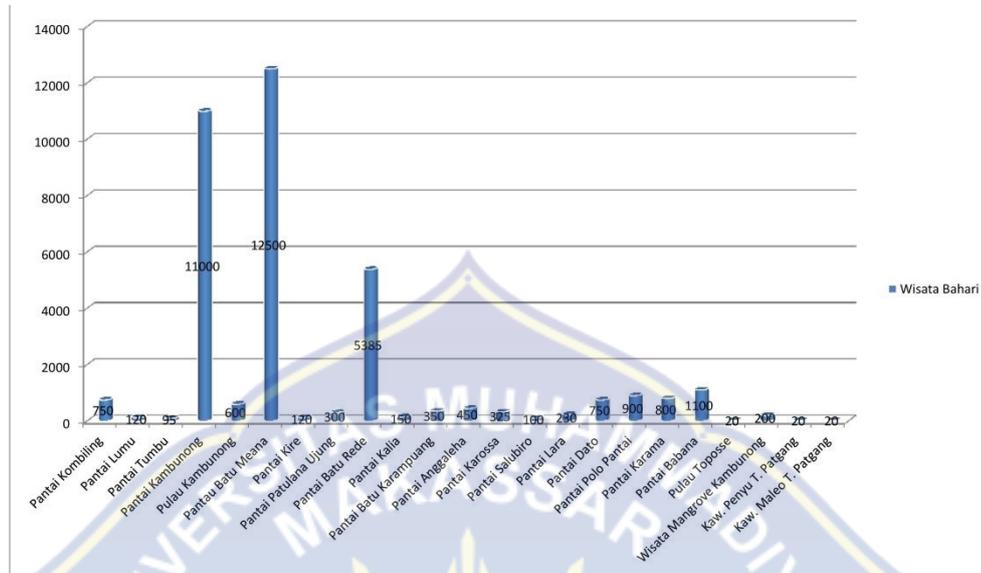
(Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah)

Tabel 1.4 Banyaknya Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018

NO.	TAHUN	WISATAWAN		
		Mancanegara	Domestik	Jumlah
1	2013	0	30.186	30.186
2	2014	0	32.268	32.268
3	2015	0	38.740	38.740
4	2016	0	39.982	39.982
5	2017	0	41.863	41.863
6	2018	0	25.108	25.108

(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah)

Tabel 1.5 Grafik Berdasarkan Jenis Objek Wisata



(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah)

a. Pemerintah

Beberapa urusan-urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh aktor tunggal yakni pemerintah menjadi dikelola bersama dengan aktor-aktor lain seperti sektor swasta dan masyarakat. dengan adanya *governance* menjadikan pemerintah tidak lagi dominan dan menciptakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan urusan-urusan publik. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Terkait dengan apa yang di sampaikan oleh salah satu informan wisata pantai Batu Mianak oleh kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata mengatakan bahwa:

“Kami baru memasuki tahap perencanaan yang dimana kedepan akan di konsep sebagai kawasan wisata kuliner yang di padukan dengan wisata pantai. Pemerintah dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata telah menganggarkan kurang lebih 2 milyar untuk pengembagan objek wisata pantai batumianak sehingga menjadi kawasan wisata unggul”.(Hasil wawancara dengan BS, 12 November2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bambang Suparni, di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa objek wisata pantai Batumianak memang butuh perhatian lebih dari pemerintah terkait karena untuk saat ini prasarana yang ada di pantai Batumianak masih sangat minim, wajar bila kedepan pemerintah akan lebih serius mengelola dengan mengalokasikan dana kurang lebih 2 miliar untuk pengembangan kawasan objek wisata pantai Batumianak.

Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya, peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. Dalam kolaborasi yang dibangun, pemerintah tetap bermain sebagai figur kunci namun tidak mendominasi yang memiliki kapasitas untuk mengkoordinasi (bukan mobilisasi) aktor-aktor pada institusi-institusi semi non-pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh staf Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan mengatakan bahwa:

“Kami dari Dinas Pariwisata merencanakan adanya pengembangan wisata pantai batumianak sebagai wisata unggulan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, Kami akan bekerja sama antara pemerintah Daerah dengan pihak swasta dalam hal ini masyarakat untuk pengembangan kawasan wisata Pantai batumianak yang berada di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah ini ” (Hasil wawancara dengan IH 13 November 2018)

Hal senada di sampaikan oleh Samsul Bahri selaku salah satu informan pengelola kawasan wisata pantai Batumianak mengatakan bahwa:

“Kami selaku pengelola akan menerima bantuan dari pemerintah yang akan di gunakan untuk membangun prasarana yang ada di kawasan pantai batumianak di antaranya itu ada mushola, villah, dan tempat parkir tentunya

kami menyambut baik niat pemerintah kalau memang itu akan direalisasikan”(Hasil wawancara dengan SB 14 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ince Huldi Tahir dan Samsul Bahri di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah benar-benar ingin mengembangkan kawasan pantai Batumianak agar terlihat menarik dengan di anggarkannya dana senilai kurang lebih 2 miliar khusus untuk memperindah kawasan wisata pantai Batumianak diantaranya pembangunan mushola dan villa bagi pengunjung agar lebih nyaman dalam berwisata dan menikmati keindahan yang terdapat di pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

Aspek kolaborasi penyelenggaraan pemerintah lebih pada aspek perumusan dan implemtasi kebijakan publik atau program dari lembaga publik, dalam hal ini yakni pemerintah. Selain itu, dalam praktiknya kolaborasi penyelenggaraan pemerintah haruslah menjunjung tinggi nilai deliberatif atau musyawarah dan konsensus antar tiap aktor atau stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi tersebut, hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh tokoh masyarakat sebagai salah satu informan mengatakan bahwa:

“Kita selaku tokoh masyarakat disini tentu menyambut baik kalau ditempat kami akan di jadikan sebagai kawasan wisata oleh pemerintah selama itu baik bagi masyarakat dan terlebih lagi dapat membantu secara ekonomi tentu saja kami sangat mendukung apa yang akan di kerjakan oleh pemerintah karena memang disini kami rasa cocok untuk di jadikan sebagai kawasan wisata unggulan” (Hasil Wawancara dengan IR 16 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ince Irwan Tahir di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat sekitar mendukung apa yang akan di lakukan oleh pemerintah karena mereka mengharapkan jika itu benar terealisasi

maka akan membawa pengaruh terhadap masyarakat sekitar dengan adanya wisatawan atau pengunjung yang datang dengan begitu dapat membantu perekonomian masyarakat dengan berjualan makanan atau oleh-oleh khas Mamuju Tengah.

Pemerintah bukanlah aktor yang tunggal atau dominan dalam pemerintahan. Selain itu bahwa terjadi pengurangan terhadap otoritas pemerintah terkait dengan urusan publik. Pemaknaan tersebut dapat ditinjau dari suatu kondisi yang terjadi ketika pemerintah dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik mengalami permasalahan di luar kemampuannya, sehingga dalam penanganan permasalahan tersebut perlu melibatkan pihak lain yang memiliki kapasitas atau kemampuan lebih dan tentunya dapat membantu pemerintah. Kondisi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapabilitas pemerintah dalam hal sumberdaya dan finansial, hal ini di sampaikan oleh salah satu informan bahwa pentingnya sarana dan prasarana di kawasan pantai Batumianak, sesuai hasil wawancara dengan salah satu pengunjung mengatakan bahwa:

“Kalau saya lihat disini sudah lumayan baik tapi masih ada yang perlu ditambah dan di benahi terutama fasilitas umum seperti toilet dan tempat sampah karena kebersihan juga harus di jaga supaya pengunjung merasa nyaman dan betah berlama – lama disini. Ya kalau soal perencanaan itu tugasnya pengelola dan pemerintah kami sebagai pengunjung hanya menikmati keindahan pantai sarana nya perlu di tingkatkan lagi agar lebih baik.” (Hasil Wawancara dengan DR 18November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Desi Rasdin di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tata kelola pariwisata pantai Batumianak sudah baik hanya saja masih ada beberapa yang perlu di tingkatkan karena bagi wisatawan kebersihan dan kenyamanan tempat wisata sangat di perlukan dan salah satunya dengan meningkatkan fasilitas yang sudah ada dan menambah sarana penunjang

seperti penginapan atau villa bagi pengunjung yang datang dari luar Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tata kelola pariwisata pantai Batumianak masih perlu perhatian lebih dari berbagai pihak terkait banyak hal yang harus dibenahi terutama dari pihak pemerintah menyangkut fasilitas umum seperti tempat parkir, ruang ganti, mushola, lampu, bale bale untuk beristirahat dan villa atau penginapan bagi wisatawan dari luar daerah. Disamping itu tentu sangat diperlukan peran aktif dari masyarakat dan pengunjung untuk sama sama merawat dan menjaga tempat tersebut demi kenyamanan bersama.

a. Masyarakat

Masyarakat merupakan sasaran utama dari program yang dicanangkan dalam perencanaan strategis. Semua yang dicantumkan dalam perencanaan strategis pada dasarnya mengarah ke masyarakat yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun ada pemikiran lain bahwa masyarakat selain memposisikan diri sebagai penerima manfaat dari program kerja pemerintah juga harus memposisikan dirinya sebagai pemilik kepentingan atau milik program kerja tersebut sehingga dengan kata lain masyarakat haruslah sebagai pelaku aktif yang perlu terlibat langsung dalam seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan yang dimilikinya. Terkait dengan apa yang di sampaikan oleh salah satu informan mengenai wisata pantai Batumianak oleh kepala Dinas Kebudayaan Dan Parawisata mengatakan bahwa:

“Seperti yang telah kami paparkan dalam perencanaan yaitu mengenai konsep yang akan dikembangkan di pantai Batumianak ini. Maka, terkait

hal tersebut upaya atau usaha yang kami lakukan untuk wisata pantai Batumianak ini, kami akan fokus pada hal yang tentunya akan memberikan manfaat pada masyarakat sekitar. Pertama, dalam pemanfaatan wisata baharinya kemudian sebagai wisata kuliner. Kedua yaitu dari segi peningkatan ekonomi.”(Hasil wawancara dengan BS, 12 November2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hal pemanfaatan objek wisata itu perlu memperhatikan dampak dan manfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi wisata bukan hanya bagaimana wisata itu dikembangkan dan memanfaatkannya oleh karena itu perlu juga adanya kerjasama yang baik antara masyarakat setempat dengan pemerintah terkait.

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang berada di suatu wilayah geografi yang sama dan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada di sekitarnya. Di negara-negara maju dan berkembang pada umumnya pariwisata dikelola oleh kalangan swasta yang memiliki modal usaha yang besar yang berasal dari luar daerah dan bahkan luar negeri. Sehingga masyarakat lokal yang berada di suatu daerah destinasi pariwisata tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata sering kali menimbulkan opini bahwa masyarakat lokal bukan termasuk stakeholders dari pariwisata dan merupakan kelompok yang termarginalisasi dari kesempatan bisnis dalam bidang pariwisata. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh staf Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan tahap perencanaan, kami ingin memanfaatkan nilai estetika atau keindahan dari pantai batumianak salah satunya dengan mengembangkan kawasan wisata tersebut. Pengembangan kawasan wisata ini dapat kami lakukan melalui wisata bahari dengan menciptakan tempat tempat unik yang dapat dijadikan objek fotografer. Melalui hal tersebut, maka akan memberikan pengaruh positif seperti pengalaman yang

menyenangkan bagi pengunjung atau para wisatawan.” (Hasil wawancara dengan IH 13 November 2018)

Hal senada yang di sampaikan oleh Samsul Bahri sebagai salah satu informan pengelola kawasan wisata pantai Batumianak.

“Seperti yang kami katakan sebelumnya, bahwa kami selaku pengelola akan menerima bantuan dari pemerintah kabupaten yaitu dari dana alokasi khusus (DAK) Dalam pemanfaatan anggaran tersebut kami akan membangun prasarana dan tempat yang dapat dijadikan objek yang menarik tidak hanya untuk pengunjung namun juga untuk masyarakat disekitar” (Hasil wawancara dengan SB 14 November)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ince Huldi Tahir dan Samsul Bahri maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang masih menjadi perhatian utama dari pihak pengelola adalah perbaikan sarana bagi pengunjung agar dalam pemanfaatan objek wisata Pantai Batuminak ini bisa lebih baik lagi dan masyarakat juga dapat menikmati apa yang akan dibangun oleh pihak pemerintah maupun pengelola.

Potensi daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah sebagai sumber yang bisa digali untuk menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik. Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu Kabupaten yang memiliki potensi dalam hal kekayaan budaya dan pariwisata baik itu potensi alam sebagai suatu anugrah tuhan yang maha esa maupun potensi budaya yang berhasil diciptakan melalui tangan-tangan yang terampil. hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh tokoh masyarakat sebagai salah satu informan mengatakan bahwa:

“Kita patut bangga dengan daerah kita ini yang menyediakan begitu banyak potensi wisata salah satu nya pantai batumianak. Baik wisata alam maupun wisata budaya sekarang tinggal bagaimana peran pemerintah dalam memanfaatkan semua ini dan menggali potensi yang ada khususnya objek wisata pantai batuminak. Kami selaku tokoh masyarakat pada dasarnya selalu mendukung apalagi dalam proses nya melibatkan masyarakat sekitar

pesisir agar pemanfaatan objek wisata ini juga dapat di rasakan oleh mereka”. (Hasil Wawancara dengan IR 16 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ince Irwan Tahir di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa semua yang akan dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas terkait akan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan tokoh masyarakat sekitar selama pemanfaatannya melibatkan mereka agar apabila objek wisata tersebut berkembang bukan hanya orang luar yang akan mendapatkan manfaatnya tapi mereka juga bisa dapat manfaatnya dengan berjualan di sekitar objek wisata tersebut.

Masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan pariwisata, karena pada dasarnya pilar pariwisata itu terdiri dari pertama pemerintah, kedua swasta dan ketiga masyarakat, yang sering disebut tiga pilar utama pariwisata. Misalnya, setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan pariwisata yang diiringi dengan regulasinya tentunya. Kemudian pihak swasta yang secara profesional menyediakan jasa pelayanan bagi pengembangan pariwisata tersebut, maka tugas masyarakat adalah selain senantiasa membangkitkan kesadaran tentang pentingnya pariwisata juga menumbuh-kembangkan kreatifitas yang melahirkan berbagai kreasi segar yang mengundang perhatian untuk kemudian menjadi daya pikat pariwisata. Hal ini pula yang disampaikan oleh salah satu informan mengenai pemanfaatan kawasan pantai Batumianak. Sesuai hasil wawancara dengan pengujung yang mengatakan bahwa:

“Saya sebagai pengunjung melihat memang sudah ada upaya dari pemerintah untuk memanfaatkan potensi daerah ini khususnya di bidang pariwisata, tapi memang harus kita akui bahwa sejauh ini belum maksimal. Ya mungkin harus ada kegiatan lagi disini seperti festival seni *lalla tassisara* yang kemarin sempat di adakan supaya ke depan pantai ini bisa

lebih banyak pengunjungnya”.(hasil wawancara dengan DR 18 November 2018).

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah telah mengupayakan agar pariwisata ini bisa lebih berkembang salah satunya dengan mengadakan festival kebudayaan daerah lalla tassisara hanya saja itu tidak dilakukan secara berkesinambungan sehingga promosi potensi wisata tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat dimana masyarakat berharap sebagai daerah otonomi baru pemerintah harus lebih cermat dalam menggali potensi daerah khususnya pariwisata.

Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah berharap objek wisata pantai batumianak bisa menjadi sarana bagi pemerintah untuk memperkenalkan daerah dan kebudayaan yang ada di Mamuju Tengah, hanya saja masih belum di manfaatkan secara maksimal, masih banyak hal yang harus di benahi baik itu dari sarana wisatanya maupun faktor penunjang seperti infrastruktur jalan menuju ke pantai karena infrastruktur merupakan pendukung utama bagi suatu wilayah terutama jika wilayah tersebut memiliki kawasan yang dijadikan tempat berwisata minimnya upaya pemerintah dalam hal promosi juga sangat disayangkan itu terlihat dari kurangnya kegiatan keudayaan yang dapat menarik wisatawan.

b. Swasta

Aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu

membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi. Hal ini pula yang disampaikan oleh salah satu informan mengenai pengendalian Pantai Batumianak sesuai hasil wawancara dengan kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata mengatakan bahwa:

“Dalam hal pengendalian kami dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata khususnya bidang Pariwisata bekerja sama dengan masyarakat sekitar dalam hal ini pemuda pesisir, mereka adalah komunitas pemuda pecinta lingkungan yang fokus terhadap kelestarian lingkungan pesisir pantai, dan menjaga agar ekosistem di pantai batumianak tidak rusak karena adanya kegiatan wisata,”(Hasil wawancara dengan BS, 12 November 2018.)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hal pengendalian kawasan pantai batumianak pemerintah belum mampu melakukannya secara maksimal oleh karena itu di butuhkan peran serta masyarakat atau komunitas tertentu untuk berperan serta dalam menjaga kelestarian lingkungan sehingga fungsi dari pengendalain itu bisa berjalan. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian merupakan salah satu tugas dari manager atau kepala bidang yang fungsinya adalah seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staff, dan mengarahkan.

Keterlibatan swasta dalam optimalisasi pelayanan publik, sangat mendukung dalam pencapaian tujuan besar yaitu Good Governance. Dalam konsep Good Governance, peran masyarakat dan sektor swasta menjadi sangat penting karena adanya perubahan paradigma pembangunan dengan meninjau

ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula berperan sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh staf Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan mengatakan bahwa:

“Kami dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap pengembangan pariwisata pantai batumianak, kami akan membentuk tim pengawasan dan bekerja sama dengan komunitas pemuda pesisir hal ini karena mereka lebih memahi kondisi disana sekaligus sebagai upaya dari pemerintah untuk melibatkan peran aktif masyarakat khususnya pemuda dalam menjaga lingkungan pariwisata sebagai salah satu aset daerah”.(Hasil wawancara dengan IH 13 November 2018).

Hal ini senada yang disampaikan oleh salah satu informan Samsul Bahri mengatakan bahwa :

“Kami pada awalnya bergerak bersama masyarakat sebagai bentuk kesadaran bahwa menjaga lingkungan itu penting dan mulai melihat ada potensi yang bisa di kembangkan dan bernilai ekonomi, sebelum akhirnya pemerintah melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata melihat ada potensi disini sehingga merasa perlu untuk memfasilitasi atau membantu kami dalam menjaga tempat ini, memang harus kita akui juga bahwa masih banyak yang perlu di tambah kalau memang pemerintah serius ingin kawasan pantai batumianak itu bisa menjadi kebanggaan masyarakat Mamuju Tengah”.(Hasil wawancara dengan SB 14 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah kurang memberikan perhatian kepada kawasan wisata pantai batumianak oleh karena itu masyarakat merasa perlu ada upaya merawat dan menjaga tanpa menunggu bantuan dari pemerintah terkait hal ini tentu sangat di sayangkan mengingat seharusnya pemerintah adalah penggerak utama dalam merawat dan mengembangkan kawasan wisata batumianak

Peran swasta dalam usaha pencapaian pelayanan publik yang optimal dan mensejahterakan rakyat. Namun, pada intinya peran swasta pada saat ini memiliki fungsi yang sangat strategis baik sebagai agen kontrol terhadap pemerintah maupun sebagai pelengkap fungsi pemerintah yang tidak mampu secara optimal menyediakan fasilitas pelayanan publik di berbagai bidang. Sementara itu, dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, maka pemerintah juga tidak lagi memiliki superioritas mutlak untuk mengendalikan keberadaan sektor swasta apalagi melalui tindakan-tindakan represif. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh tokoh masyarakat selaku informan mengatakan bahwa:

“Menurut saya pengendalian disini lebih kepada pengawasan agar kedepannya tidak ada kesalahan dalam proses pengembangan pariwisata batumianak ini. Menjaga apa yang sudah ada dan menambah prasarana yang masih kurang saya rasa bagian dari upaya pemerintah dalam pengendalian objek wisata pantai batumianak ini” (Hasil wawancara dengan IR 16 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat ingin pengelolaan dan pengendalian kawasan wisata pantai batumianak ini tetap menjaga keasrian alamnya tanpa harus mengeksploitasi secara berlebihan sehingga merusak alam, cukup menambah prasarana yang kurang sebagai penunjang bagi wisatawan.

Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh salah satu informan mengatakan bahwa:

“Saya rasa pengendalian itu sangat penting karena kalau hanya mau mengembangkan suatu pariwisata tapi tidak di lakukan pengendalian dengan baik maka apa yang akan di kerjakan oleh pemerintah akan menjadi sia sia nanti nya, kalau dari kami pengunjung pengendalian yang bisa kami lakukan hanya sebatas menjaga keasrian dan kebersihan kawasan wisata batumianak ini selebihnya itu tugas pemerintah terkait atau pihak pengelola.”(Hasil wawancara dengan DR 18 November 2018)

Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak swasta sebagai salah satu pemegang peranan dalam pengembangan objek wisata yang seharusnya dapat di lakukan dengan melibatkan pihak – pihak terkait namun masih belum sesuai dengan yang di harapkan, karena pengawasan seharusnya bisa lebih maksimal bila pemerintah dan semua stakholder mampu bahu membahu dalam upaya pengendalian tersebut.

C. Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

1. Faktor Pendukung

a. Potensi Daerah

Potensi daerah suatu kekayaan yang di miliki oleh suatu daerah sebagai sumber yang bisa di gali untuk menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah otonomi baru memiliki sumber daya alam yang begitu kaya dan belum tereksplorasi dengan baik sehingga masih dapat di kelola dan di kembangkan sebagai salah satu aset daerah. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu informan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata mengatakan bahwa:

“Potensi daerah ini sangat luar biasa baik wisata alam maupun wisata budayanya. Sekarang tinggal bagaimana kita selaku masyarakat Mamuju Tengah bisa menghargai dan merawat apa yang tuhan dan alam berikan kepada kita, potensi wisata yang banyak ini secara tidak langsung akan

sangat mendukung dalam pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Mamuju Tengah. Dari potensi wisata yang banyak ini, di harapkan menghasilkan berbagai manfaat baik untuk daerah ataupun masyarakat”. (Hasil wawancara dengan BS 12 November 2018).

Hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh salah satu informan Ince irwan Tahir mengatakan bahwa:

“Saya sebagai putra daerah dan orang asli Mamuju sangat bersyukur dan bangga dengan potensi yang di miliki oleh daerah ini. Karena sebagai suatu daerah yang di berikan begitu banyak kekayaan alam kita juga begitu kaya dengan keberagaman budaya yang di bawa oleh saudara-saudara kita yang berasal dari luar seperti bali, jawa dan saudara-saudara kita dari daerah lain. Karena dari keberagaman suku yang ada disini kita mendapatkan banyak manfaat salah satunya adalah keberagaman kebudayaan yang dapat menjadi nilai lebih. (hasil wawancara dengan IR 16 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu daerah seperti Mamuju Tengah yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam dan budaya sudah selayaknya dapat di manfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah, karena bukan tidak mungkin sebagai daerah yang masih terbilang sangat muda Kabupaten Mamuju Tengah akan menjadi salah satu tujuan utama dari wisatawan karena keanekaragaman budaya dan kekayaanalamnya yang terjaga.

Pembentukan suatu daerah otonom salah satunya perlu mempertimbangkan kriteria potensi daerah. Setiap daerah memiliki berbagai potensi yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi upaya mempertahankan standar kesejahteraan yang telah dicapai warganya maupun dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kehidupan pada taraf yang lebih baik. Potensi daerah dalam hal ini dapat berupa penduduk sebagai sumber tenaga kerja, potensi yang berupa sarana dan prasarana fisik, maupun potensi yang berupa kelembagaan yang

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Keberadaan potensi-potensi tersebut saat ini (kondisi eksisting) dapat dianggap sebagai modal dasar bagi daerah yang akan dibentuk. Demikian pula, daerah tentu saja memiliki berbagai potensi lain yang masih bersifat laten dan masih belum dapat dikembangkan karena berbagai kendala. Seluruh potensi tersebut dapat dianggap sebagai sumber daya daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu informan Ince Huldi Tahir mengatakan bahwa:

“Kita tahu sendiri bahwa daerah kita ini bisa di kategorikan sebagai miniatur nya indonesia hampir semua suku dan kebudayaan ada disini, apalagi di dukung dengan begitu banyak nya potensi wisata, memang untuk saat ini belum bisa kita akomodasi semua tapi tetap harus kita syukuri dan upayakan agar potensi ini bisa di rasakan manfaatnya khususnya di bidang pariwisata.(Hasil wawancara dengan IH 13 November 2018)

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu informan Samsul Bahri mengatakan bahwa:

“Masyarakat di Mamuju Tengah ini saya rasa juga tahu bahwa daerah nya memiliki potensi yang sangat baik, tanahnya subur, budayanya beragam, apalagi sektor pariwisata nya yang ada saat ini itu bisa di bilang bonus untuk daerah tapi kalau tidak di perhatikan jangan sampai itu semua sia sia.(Hasil wawancara dengan SB 14 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan segala potensi yang dimiliki suatu daerah bisa menjadi aset untuk kemajuan daerah tersebut bila di kelola dengan baik, karena banyak nya kekayaan alam jika tidak di perhatikan hanya akan sia sia seperti yang disampaikan oleh informan diatas.

Potensi daerah dapat dibedakan menjadi potensi yang bersifat alamiah (natural, bukan buatan) dan potensi yang bersifat buatan. Potensi alamiah terdiri potensi sumber daya alam (SDA) dan potensi sumber daya manusia (SDM).

Potensi sumber daya alam meliputi seluruh bumi, air dan seluruh kekayaan alam lainnya beserta apa yang terkandung di dalamnya. Sedangkan potensi sumber daya manusia meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, baik aspek fisik maupun aspek non fisik. Sementara potensi sumber daya buatan meliputi seluruh hasil usaha dan kemampuan manusia baik yang berupa teknologi, sarana dan prasarana, produk maupun yang berupa institusi atau organisasi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini senada dengan yang disampaikan Desi Rasdin mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya pantai batumianak ini termasuk salah satu dari potensi daerah karena sejak dulu kalau berbicara pariwisata pasti salah satu yang paling rame saya lihat disini hanya memang penambahannya agak lambat. (Hasil wawancara dengan DR 18 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pantai batumianak memiliki daya tarik tersendiri di mata pengunjung karena bisa dikatakan hampir setiap waktu selalu ada yang datang terutama di hari libur maupun hari besar seperti lebaran. Hanya saja tidak didukung dengan percepatan pembangunan fasilitas tentu ini sangat disayangkan bila tidak cepat ditangani.

b. Peran Aktif Masyarakat

Suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa. begitu luasnya pengertian dan pemahaman peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, sehingga menimbulkan beraneka ragam penafsiran, yang sering kali penafsiran pihak yang kuatlah yang timbul

danmereduksi peran serta yang bermakna (*meaningfull participation*). dari sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok-kelompok yang selama ini tidak diikuti sertakan dalam proses pengambilan keputusan (non elite) dan kelompok-kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite). Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu informan Ince Huldi Tahir, mengatakan bahwa:

“kami sangat bangga dengan masyarakat dan pengelola objek wisata pantai batumianak, secara khusus pemuda pesisir karena mereka dengan kesadaran sendiri mau membantu untuk menjaga kebersihan disekitar pantai batumianak tanpa ada perintah langsung dari pihak tertentu. Hal ini adalah bentuk keseriusan masyarakat dalam menjaga pantai batumianak tanpa menunggu bantuan atau penyediaan fasilitas dari pemerintah”.(hasil wawancara dengan IH13 November 2018).

Hal senada di sampaikan oleh salah satu informan Samsul Bahri mengatakan bahwa

”Kita tidak bisa hanya berharap kepada pemerintah sebagai masyarakat saya rasa memang sudah sepatang nya ikut terlibat dalam menjaga dan melestarikan tempat wisata ini, namun bukan berarti pemerintah bisa lepas tangan dalam mengelola pantai batumianak ini yang harus di lakukan adalah adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat karena akan sangat membantu pengembangan objek wisata itu sendiri.”(hasil wawancara dengan SB 14 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat sangat sadar akan potensi yang di miliki oleh daerahnya khususnya masyarakat sekitar pantai batumianak. Mereka bergerak tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah, walaupun idealnya pemerintah yang harus lebih aktif karena tentu saja masyarakat memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan.

Salah satu faktor kunci dalam pengembangan pariwisata adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Partisipasi masyarakat tersebut seyogyanya berlangsung secara sukarela dan kontinyu. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi yang memandang masyarakat sebagai subjek dari segala aturan pembangunan bukan sebagai objek pembangunan. Pelibatan masyarakat ini secara utuh dilakukan melalui pola pikir pembangunan yang memandang masyarakat sebagai subyek peraturan dengan keanekaragaman perilaku. Melalui proses pelibatan partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan pengembangan pembangunan yang telah dilakukan dan menjadi masukan bagi proses pengembangan selanjutnya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu informan Ince irwan mengatakan bahwa:

“Masyarakat disini saya rasa tidak perlu diminta minta untuk turut serta dalam membangun pariwisata mereka juga sudah sangat peduli karena mereka juga punya inisiatif sebenarnya untuk mengembangkan kawasan wisata ini. Itulah bagusny kalau masyarakat di kampung etos gotong royong masih sangat baik jika di bandingkan dikota”(Hasil wawancara dengan IR 16 November 2018)

Hal senada disampaikan oleh salah satu informan Bambang Suparni mengatakan bahwa:

“Kami kan baru akan masuk pada proses pengembangan agar kawasan wisata batumianak ini menjadi lebih baik, insya allah kami akan melibatkan masyarakat sekitar mungkin dimulai dari dialog antara pemerintah dan masyarakat agar ada kesepahaman tentang bagaimana kedepan kita mengembangkan pariwisata disana, salah satu yang kami apresiasi adalah kesadaran masyarakat mereka sangat aktif itu juga yang membuat kami optimis ini akan berjalan dengan baik.”(Hasil wawancara dengan BS 12 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada kesamaan keinginan antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat sangat aktif menjaga pantai batumianak sedangkan pihak pemerintah juga sedang berupaya dalam menambah fasilitas yang ada melalui pengembangan kawasan pantai batuminak hanya saja di perlukan komunikasi agar apa yang di harapkan masyarakat bisa sejalan dengan program pemerintah.

Proses pengembangan sangat ditentukan oleh peran dan partisipasi masyarakat yang berada dikawasan pembangunan pariwisata itu sendiri. Untuk menunjang proses tersebut maka pemahaman masyarakat serta tingkat partisipasi masyarakat menyangkut pengembangan pariwisata perlu dipahami oleh seluruh pemangku dan pembuat kebijakan. Ini penting guna mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat khususnya ekowisata yang dicanangkan oleh pemerintah. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam suatu proses kegiatan pariwisata, dimulai dari proses penyusunan rencana, pemanfaatan dan pengendalian objek wisata. Hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh salah satu informan mengatakan bahwa:

“Pemerintah harus melibatkan warga disini karena bagaimanapun juga mereka orang yang sudah lama tinggal di kawasan batumianak ini, jangan sampai nanti di belakang ada masalah kalau dari awalnya saja warga sudah tidak dilibatkan dalam rencana pemerintah. Kalau saya lihat warga disini cukup aktif ya terlihat dari inisiatif mereka membuat kafe kafe sederhana.” (Hasil wawancara dengan DR 18 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bukan hanya pemerintah yang rencananya akan melibatkan masyarakat dalam pengembangan Tata Kelola Pantai Batumianak namun ada harapan dari tokoh masyarakat dan pengunjung bahwa memang warga sekitar harus ikut di libatkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

2. Faktor Peghambat

a. Sarana Prasarana Belum Memadai

Infrastruktur sebagai kebutuhan dasar fisik sangat di perlukan untuk jaminan sebagai layanan dan fasilitas agar perekonomian dapat berjalan dengan baik hal ini juga tentunya berlaku dalam kegiatan kepariwisataan, khusus nya di wisata pantai batumianak. Objek wisata yang baik adalah objek wisata yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan cukup memadai untuk wisatawan sebagai penunjang suatu kawasan wisata.

Hal ini senada yang di sampaikan oleh salah satu informan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan bahwa:

“Kami tentu saja mengupayakan sedikit demi sedikit dapat menyediakan fasilitas yang memadai untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung, namun itu tidak bisa sekaligus kita peradakan apa yang saat ini belum terbangun di pantai batumianak, semuanya tentu membutuhkan proses karena yang namanya membangun dan mengelola kawasan wisata itu tidaklah semudah yang orang bayangkan.” (Hasil wawancara dengan BS 12 November 2018)

Hal senada di sampaikan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“Kalau kita inginnya pemerintah cepat menambah fasilitas yang ada disini karena yang sekarang ini masih kurang atau bisa di bilang masih jauh dari harapan pengunjung, kita sebagai pengunjung tentu saja akan merasa lebih nyaman kalau sudah ada mushola, tempat ganti pakaian dan fasilitas lain nya di perbanyak seperti tempat sampah dan parkir kendaraan.” (Hasil wawancara dengan DR 18 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah dan masyarakat sama-sama ingin adanya peningkatan dalam kawasan wisata Pantai Batumianak hanya saja sebagai pengunjung tentunya mereka ingin prasarana yang kurang agar segera di lengkapi karena itu menyangkut kenyamanan bagi mereka sedangkan pemerintah menganggap semua butuh proses dan perencanaan yang baik.

Prasarana pariwisata yaitu semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam berwisata. Tentunya adalah sarana dan prasarana pendukung wisata. Kita akan lebih nyaman dan lebih menikmati kegiatan berwisata apabila sarana dan prasarannya lengkap dan dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat. Untuk itu peran sarana dan prasarana dalam sebuah tempat pariwisata untuk pendukung wisata sangatlah penting. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu informan mengatakan bahwa:

“ Pemerintah akan segera mengupayakan agar prasarana penunjang itu bisa secepatnya di buat akan tetapi kita harus tahu juga bahwa semua itu butuh proses dan itu tidaklah instan, kami bisa pahami keinginan dari masyarakat agar segera ada perbaikan dalam hal fasilitas penunjang bagi para pengunjung atau wisatawan yang datang namun harus kita pahami juga kalau itu semua perlu perencanaan yang baik selain tentunya anggaran yang memadai” (Hasil wawancara dengan IH 13 November 2018)

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu informan Samsul

Bahri mengatakan bahwa:

“Masyarakat saya rasa sudah sangat pro aktif dengan berusaha membangun kafe kafe sederhana untuk mengakomodasi kebutuhan pengunjung yang datang , karena kalau mereka menunggu dari pihak pemerintah untuk

membangun fasilitas dibutuhkan waktu yang lumayan lama karena pemerintah berasalan perlu perencanaan yang matang dan anggaran nya belum memadai.”(Hasil wawancara dengan SB 14 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah ingin membangun sarana dan prasarana di pantai batumianak berdasarkan perencanaan yang baik dan itu dibutuhkan waktu yang tepat serta anggaran yang memadai, namun dilain pihak masyarakat ingin adanya langkah kongkrit dari pihak terkait agar segera adanya realisasi dalam hal pemenuhan kebutuhan fasilitas penunjang.

Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu objek wisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri. Di samping berbagai kebutuhan yang telah disebutkan di atas, kebutuhan wisatawan yang lain juga perlu disediakan di daerah tujuan wisata seperti ATM, apotik, SPBU, pusat-pusat pembelanjaan dan sebagainya. Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata diperlakukan koordinasi yang mantang antara instansi terkait bersama dengan instalasi pariwisata di berbagai tingkatan. Dukungan instansi terkait dalam membangun prasarana wisata sangat diperlukan bagi pengembangan pariwisata di daerah. Koordinasi di tingkat perencanaan yang dilanjutkan dengan koordinasi di tingkat pelaksanaan merupakan modal utama suksesnya pembangunan pariwisata. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu informan mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana yang ada di pantai batumianak ini sebaiknya di tata ulang, di perbaiki dan di tambah mengingat objek wisata pantai batumianak memiliki potensi yang cukup menarik dan tidak kalah dengan objek wisata di tempat lain. Fasilitas yang ada di pantai batumianak sebagian memang sudah tidak layak bagi para pengunjung kami selaku tokoh masyarakat

berharapa segera ada perubahan ataupun perbaikan.”(Hasil wawancara dengan IR 16 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masih banyak permasalahan di objek wisata pantai batumianak khususnya pada fasilitas penunjang bagi pengunjung karena ada beberapa fasilitas yang sudah tidak memadai namun belum ada perbaikan ataupun penambahan sangat di sayangkan karena hal tersebut merupakan hak bagi wisatawan untuk memperoleh kenyamanan berwisata.

b. Keterbatasan anggaran

Anggaran dalam pengelolaan objek wisata sangat penting, setiap objek wisata membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam pengelolaannya, karena objek wisata atau infrastruktur harus di lengkapi dengan sarana dan prasarana yang mampu menarik minat wisatawan untuk berwisata sehingga menarik para penikmat wisatawan dan ini akan menjadi masalah yang dihadapi dalam pengelolaan objek wisata khususnya di Pantai batumianak. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan bahwa :

“Memang kalau kita berbicara mengenai pengembangan pariwisata tentu tidak bisa lepas dari yang namanya anggaran, untuk tahun ini kami belum memiliki anggarannya karena untuk menambah fasilitas yang masih minim tentu kita harus membangun dan untuk membangun itu tidak akan terealisasi jika tidak ada anggaran”. (Hasil wawancara dengan BS 12 November 2018)

Hal senada disampaikan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“Ya anggaran ini memang menjadi faktor penghambat dari kami untuk meembangkan pariwisata ini, kami berharap dengan mulai bertambah nya pengunjung yang datang ke pantai batumianak bisa sejalan dengan bertambah nya prasarana dan itu tentu nya di dukung dengan anggran yang baik”. (hasil wawancara dengan SB 14 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor anggaran untuk tahun ini menjadi penghambat utama dalam proses pengembangan pariwisata Pantai Batumianak. Ini seperti menjadi masalah yang klasik dimana ketika suatu daerah yang memiliki sumber daya alam yang baik tidak di dukung dengan anggaran yang memadai dalam proses pengembangannya.

Sumber daya manusia dalam pengembangan objek wisata sangat penting, khususnya yang paham bagaimana potensi wisata tersebut akan di kembangkan. Akan tetapi anggaran juga merupakan suatu penunjang utama dalam rencana yang disusun secara sistematis dan meliputi seluruh kegiatan organisasi atau instansi untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Begitu juga dengan pengembangan Pantai Batumianak namun anggaran seringkali menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu informan mengatakan bahwa:

“Kami untuk tahun ini memang belum memiliki anggaran yang cukup, tapi tahun depan akan kita usahakan karena pemerintah menganggarkan sekitar kurang lebih 2 miliar untuk objek wisata pantai batumianak itu semua untuk memperbaiki fasilitas yang di anggap sudah tidak layak atau masih kurang” (Hasil wawancara dengan IH 13 November 2018).

Hal senada di sampaikan oleh salah satu informan Ince Irwan Tahir mengatakan bahwa:

“Kita juga harus mengetahui bersama bahwa yang namanya anggaran itu menjadi faktor penting dalam mengelola objek wisata, kita mungkin punya masyarakat yang sudah sadar akan potensi wisata tapi itu saja kan tidak cukup kalau tidak di topang dengan anggran yang baik karena untuk merawat objek wisata itu di butuhkan anggaran juga dan itu tentunya tugas dari pemerintah.”(Hasil wawancara dengan IR 16 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa selama ini yang menjadi penghambat adalah minimnya anggaran dari pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sehingga pengembangan dan perawatan fasilitas menjadi kurang maksimal. Sedangkan untuk merawat fasilitas objek wisata di butuhkan anggaran seperti yang dikatakan oleh kedua informan di atas. anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa. Anggaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan formal untuk tercapainya pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat membantu pelaksanaan manajemen. Di dalam menyusun suatu anggaran perusahaan maka perlu diperhatikan beberapa syarat yakni bahwa anggaran tersebut harus tepat sasaran dengan apa yang akan dikerjakan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu informan mengatakan bahwa:

“Kalau di lihat dari kurangnya fasilitas yang ada sepertinya ini karena kurangnya dana dari pemerintah atau bisa juga karena kurang di perhatikan masa tidak ada sama sekali anggaran ini kan objek wisata favorit di Mamuju Tengah”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana di objek wisata pantai batumianak bisa di sebabkan karena kurangnya anggaran atau memang pemerintah belum terlalu serius dalam melihat objek wisata pantai batumianak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara mengenai Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wisata pantai Batumianak sudah berjalan sesuai dengan indikator tata kelola pariwisata namun saat ini masih dalam tahap perencanaan dan pengembangan sehingga mampu menjadi salah satu wisata unggulan khususnya di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Faktor pendukung dalam pengelolaan objek wisata yaitu potensi daerah dan peran aktif dari masyarakat sehingga dapat mengembangkan dan membangun objek wisata Pantai BatuMianak yang lebih baik dan dapat menarik perhatian wisatawan. Sedangkan faktor penghambat dalam Tata Kelola Pariwisata Pantai BatuMianak yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan anggaran sehingga menghambat dalam proses pengembangan objek wisata Pantai BatuMianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan dari hasil penelitian yang dilakukan selama penelitian adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya perhatian lebih dari pemerintah terkait agar peningkatan mutu sarana dan prasarana pariwisata Batumianak menjadi lebih baik dan berkembang karena hal tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang akan datang.
2. Pemerintah harus memanfaatkan setiap potensi yang ada termasuk peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata sehingga apa yang menjadi tujuannya itu tercapainya objek wisata unggulan pantai batumianak dapat terlaksana sesuai apa yang sudah di rencanakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ashar Refdini (2013:11) PT. *Daya Tarik Wisatawan Kedaulatan Rakyat* Pradaya Paramita : Jakarta.
- Astomo, Putra. 2014. *Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 64 Th. XVI
- Edison, Prastya Imam Yudhi, Sudirman. 2017. *Jurnal Tata Kelola (Governance) Sektor Pariwisata Di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Pada Destinasi Wisata Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan)*. Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Fandeli, Chafid, (2000). *Pengusaha Ekowisata*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Hermit, Herman, 2009. *Komentar atas Undang-Undang Rumah Susun*, Mandar Maju,. Bandung,.
- J. Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya
- Koesoemaamadja, Mochtar.1982. *Pengantar Hukum Internasional*. Cet. Keempat. Binacipta,Bandung.
- Lubis , Alamsyah Fuad Anwar. 2017. *Skripsi Collaborative Governance Dalam Program Cerdas (Percepatan Rehabilitasi Dan Apresiasi Terhadap Sekolah) Di Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Sumatera Utara
- M. Daud Silalahi, 2001. *Hukum Lingkungan: dalam sistem penegakan Hukum*. Lingkungan Indonesia, Edisi Revisi, Alumni, Bandung,. hlm 79.
- Milles, Huberman 1992. *Analisis Kualitatif*. Alfabeta : Bandung
- Ningrum, Ayu Erlina. 2016. *Studi Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014*. JOM FISIP Vol. 3 No. 2
- Nawawi Juanda. 2012. *Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3
- Pasolong 2013. *Metode Penelitian*. Alfabeta : Bandung
- Rahardjo, Susilo & Gudnanto. (2011). *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Kudus: Nora Media Enterprise
- Sugi Rahayu dan Hidayat Khoirul Isna. 2017. *Good Tourism Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Di Kawasan Kota Gede Kota Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta

Sugiyono 2010. Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta : Bandung

Suyitno. (2001). Perencanaan Wisata. Yogyakarta: Kanisius.

Syamsinar. 2016. *Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Dikantor Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda*. Ejournal Administrasi Negara, Vol. 4 No. 4

Sari, Permata Meika. 2019. *Skripsi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Horti Park Lampung Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan*. Universitas Lampung Bandar Lampung

Yoeti, Oka A. (2008). Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, Dan Implementasi. Penerbit. Kompas. Jakarta.

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 Tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang

Undang – undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab 1 Pasal 1

Undang – undang No. 27 tahun 2007 tentang Pemanfaatan Lahan Pesisir Pantai.



RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD AKSAN. Dilahirkan di Kabupaten Mamuju tengah pada tanggal 23 Mei 1994, dari pasangan Ayahanda Rasmin dan Ibunda Ninik Iestari. Peneliti masuk sekolah dasar pada tahun 2001 di SD Inpres Negeri Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dan tamat pada tahun 2007. Melanjutkan pendidikan ke SMPN 5 Budong Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi ilmu pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.





PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA

Alamat: Jl. Poros Mamuju-Palu No.- Desa Topoyo Kec. Topoyo Mamuju Tengah

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 107/070/DISPARPORA/ XII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tengah menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD AKSAN
No. Stambuk : 105640179113
Fakultas : Soisal dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Tobadak

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kab. Mamuju Tengah sejak tanggal 03 November 2018 s/d 05 Desember 2018, Dengan Judul "Tata Kelola Pariwisata Pantai Batu Mianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Topoyo
Pada Tanggal : 05 Desember 2018

a.n. KEPALA DINAS,
SEKRETARIS

ASMUNI, S.Pd., M.Pd

Pangkat: Pembina IV/a

NIP. : 19681115 199203 1 010



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@ptlusa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 230/Izn-5/C.4-VIII/XI/37/2018

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

24 Safar 1440 H

02 November 2018 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Mamuju Tengah

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Sulawesi Barat

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ عَلَى كَرَمِ وَرَحْمَةِ لِقَاءِ وَبَرَكَاتِهِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1752/ESP/A.1-VIII/XI/1440 H/2018 M tanggal 2 Nopember 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AKSAN

No. Stambuk : 105640179113

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

“ Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah”

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 Nopember 2018 s/d 3 Januari 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ عَلَى كَرَمِ وَرَحْمَةِ لِقَاءِ وَبَرَكَاتِهِ

Ketua LP3M,

Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.

NBM 101 7716